



BY
SA

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001–2023

Tegar Efraim G. Siahaan^{1*}, Joko Suharianto², Alawi Parlindungan Hasibuan³

¹⁻³ Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: gilbert27shnn@gmail.com^{1*}, djoko@unimed.ac.id², babydrackme@gmail.com³

Abstract. This study aims to analyze the effect of government spending, unemployment, and inflation on the number of poor people in North Sumatra Province during the period 2001–2023. The data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia. The analysis method used is multiple linear regression with EViews 13 software. The classical assumption tests used include normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The results show that government spending has a negative and significant effect on poverty, while unemployment and inflation have no significant effect. Simultaneously, the three variables have a significant influence on the number of poor people in North Sumatra. It is recommended that the government increase the effectiveness of spending on strategic sectors for poverty alleviation and maintain economic stability with integrated policies.

Keywords: Government Spending, Inflation, Poverty, Unemployment.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan perangkat lunak EViews 13. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Disarankan agar pemerintah meningkatkan efektivitas pengeluaran pada sektor strategis untuk pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan yang terintegrasi.

Kata kunci: Inflasi , Kemiskinan, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, angka kemiskinan belum dapat sepenuhnya ditekan. Di Provinsi Sumatera Utara, fluktuasi jumlah penduduk miskin selama periode 2001–2021 menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu perhatian serius.

Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek ekonomi. Beberapa variabel yang sering dikaitkan dengan kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi. Pengeluaran pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi pendapatan rumah tangga dan memperburuk

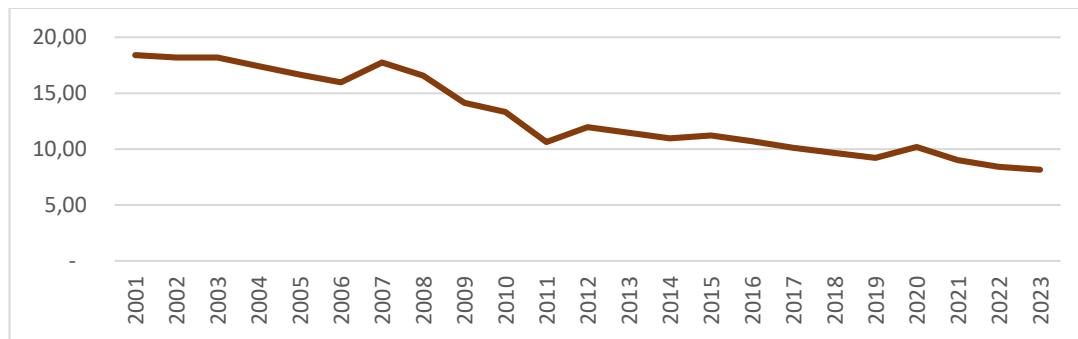
kondisi ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali juga dapat menurunkan daya beli, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah ini. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan minimum untuk hidup layak (BPS, 2022).

Sen (1999) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya, layanan publik, dan kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak dapat diukur hanya dengan satu indikator ekonomi saja.

Dalam konteks ekonomi makro, kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kurangnya kesempatan kerja, rendahnya pendidikan, dan lemahnya daya beli masyarakat (Blanchard, 2020). Penurunan tingkat kemiskinan memerlukan intervensi yang komprehensif, termasuk penguatan ekonomi lokal dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Berikut merupakan grafik kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2001-2023.



Sumber: BPS Sumatera Utara (2025)

Gambar 1. Grafik fluktuasi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2001-2023

Berdasarkan grafik pada gambar 1, data tingkat kemiskinan di Sumatera Utara selama periode 2002–2023 menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan, meskipun disertai dengan beberapa fluktuasi yang mencolok. Pada awal periode, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, mencapai angka di atas 18%, namun mulai mengalami penurunan bertahap hingga menyentuh angka sekitar 16% dan 14% dalam beberapa tahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami kenaikan kembali di beberapa tahun tertentu, seperti lonjakan ke 17,75%, tren menurun tetap berlanjut hingga menembus angka 10% di pertengahan periode. Setelah mencapai sekitar 10%–11%, tingkat kemiskinan cenderung stabil dengan sedikit variasi sebelum akhirnya terus menurun hingga titik terendah sekitar 8,15% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, meskipun adanya fluktuasi menandakan tantangan ekonomi yang tetap memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan ekonomi. Menurut Keynes (1936), peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang permintaan agregat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah yang efektif dapat meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penelitian oleh Simanjuntak (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, efektivitasnya bergantung pada efisiensi alokasi anggaran dan ketepatan sasaran kebijakan (Hidayat & Siregar, 2020).

Pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja (BPS, 2022).

Menurut Todaro dan Smith (2020), pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu pengangguran struktural, friksional, siklis, dan teknologi. Tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan memperburuk kesejahteraan rumah tangga, sehingga meningkatkan kemiskinan (Samuelson & Nordhaus, 2019).

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Menurut Mankiw (2018), inflasi dapat disebabkan oleh faktor permintaan (demand-pull inflation), kenaikan biaya produksi (cost-push inflation), dan ekspektasi inflasi.

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ketika harga barang kebutuhan pokok meningkat, rumah tangga miskin menjadi lebih rentan terhadap kesulitan ekonomi (Blanchard, 2020). Namun, inflasi moderat terkadang dianggap sebagai indikator ekonomi yang sehat jika disertai dengan peningkatan pendapatan.

Dalam konteks penelitian ini, pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi dianalisis untuk mengetahui sejauh mana fluktuasi harga memengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam menjaga menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu (time series) dari tahun 2001 hingga 2021. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, yang mencakup data jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan inflasi di Provinsi Sumatera Utara. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan perangkat lunak EViews 13 yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik pada data. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Model regresi yang digunakan adalah:

$$M = \beta + \beta_1 PP + \beta_2 P + \beta_3 I + \varepsilon$$

Dimana:

M : Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

PP : Jumlah Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah)

P : Jumlah Pengangguran (Jiwa)

I : Inflasi (%)

ε : Term Error

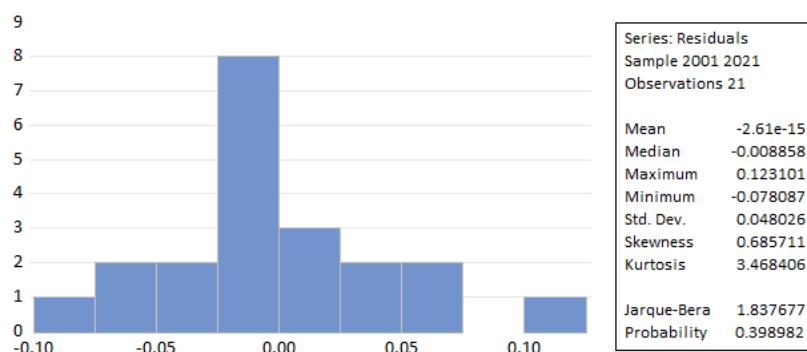
β : Konstanta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan asumsi penting dalam banyak analisis statistik, termasuk regresi, karena metode ini mengasumsikan bahwa residual (selisih antara nilai prediksi dan aktual) terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau visualisasi melalui histogram dan Q-Q plot.



Sumber: Data diolah (2025)

Gambar 2. Hasil uji normalitas

Ho : tidak terdapat pelanggaran uji normalitas data

Ha : terdapat pelanggaran uji normalitas data

Kriteria : Jika nilai prob Jarque bera $< 0,05$, maka terjadi pelanggaran normalitas data.

Kesimpulan : nilai prob. Jarque-Bera sebesar $0,398 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran normalitas data dalam model penelitian ini.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual dalam model regresi, terutama pada data time series. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi standar error yang bias dan memengaruhi keandalan hasil uji hipotesis. Uji ini dapat dilakukan dengan metode Durbin-Watson, di mana nilai statistik Durbin-Watson berkisar antara 0 hingga 4. Nilai sekitar 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sementara nilai mendekati 0 atau 4 mengindikasikan autokorelasi positif atau negatif.

Tabel 1. Hasil uji autokorelasi

F-statistic	1.737756	Prob. F(2,15)	0.2095
Obs*R-squared	3.950404	Prob. Chi-Square(2)	0.1387

Sumber: Data diolah (2025)

Ho: tidak terdapat pelanggaran uji autokorelasi data

Ha: terdapat pelanggaran uji autokorelasi data

Kriteria: Jika nilai Prob. F hitung $< 0,05$, maka terjadi pelanggaran autokorelasi data.

Kesimpulan: Nilai Prob. Chi Square sebesar $0,1387 > 0,05$, maka H0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran autokorelasi data dalam model penelitian ini.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan masalah dalam estimasi koefisien regresi, seperti ketidakstabilan nilai koefisien dan kesulitan dalam mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen. Uji ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau tolerance. Jika nilai VIF lebih dari 10 atau tolerance kurang dari 0,1, indikasi multikolinearitas tinggi terdeteksi.

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.380270	2942.908	NA
PP	0.000257	142.0638	1.576174
P	0.002016	2641.170	1.014180
I	8.03E-06	4.189862	1558857

Sumber: Data diolah (2025)

Ho: tidak terdapat pelanggaran uji multikolinearity data

Ha: terdapat pelanggaran uji multikolinearity data

Kriteria: Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi pelanggaran multikolinearity data.

Kesimpulan: nilai VIF seluruh variabel < 10 , maka H0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran multikolinearity data dalam model penelitian ini.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah variance dari residual dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas) atau tidak (heteroskedastisitas). Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi standar error yang tidak akurat, sehingga memengaruhi signifikansi hasil uji statistik. Uji ini dapat dilakukan dengan metode visual (seperti scatterplot residual) atau uji statistik seperti Glejser, Breusch-Pagan, atau White.

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas

F-statistic	1.369831	Prob. F(3,17)	0.2857
Obs*R-squared	4.088177	Prob. Chi-Squared(3)	0.2521
Scaled explained SS	3.306553	Prob. Chi-Squared(3)	0.3467

Sumber: Data diolah (2025)

Ho : tidak terdapat pelanggaran uji heteroskedastisitas data

Ha : terdapat pelanggaran uji heteroskedastisitas data

Kriteria : Jika nilai Prob. F-statistic < 0,05, maka terjadi pelanggaran heteroskedastisitas data.

Kesimpulan : nilai Prob. Chi Square dari Obs*R-squared sebesar 0,2521 > 0,05, maka H0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas data dalam model penelitian ini.

B. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (terikat) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas). Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, serta mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan regresi linear berganda, peneliti dapat mengidentifikasi variabel mana yang paling signifikan dalam memengaruhi variabel dependen, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Tabel 4. Hasil analisis regresi linear berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.91590	0.616660	24.18821	0.0000
PP	-0.155300	0.016020	-9.681773	0.0000
P	0.049309	0.044895	1.098340	0.2874
I	-0.000821	0.002835	-0.289797	0.7755
R-squared	0.896180	FF-statistic	48.96745	
Adj. R-squared	0.877976	Prob(F-statistic)	0.00000	

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel di atas diketahui persamaan regresi model penelitian yang terbentuk sebagai berikut:

$$M = 14.91590 - 0.155300 PP + 0.049309 P - 0.000821I + \varepsilon$$

Interpretasi:

1. Variabel Secara Menyeluruh

Diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 14.9159036313 artinya bahwa jika variable bebas dianggap konstan, maka jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 149 %

2. Variabel Pengeluaran Pemerintah (PP)

Diperoleh nilai koefisien regresi variable pengeluaran pemerintah sebesar -0.155300 artinya bahwa apabila jumlah pengeluaran pemerintah naik sebesar 1% maka, maka jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami penurunan sebesar 15,53% dengan asumsi variable lainnya konstan

3. Variabel Pengangguran (P)

Diperoleh nilai koefisien regresi variable pengangguran sebesar 0.049309 artinya apabila jumlah pengangguran naik sebesar 1%, maka jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara naik 4,93% dengan asumsi variable lainnya konstan.

4. Variabel Inflasi (I)

Diperoleh nilai Koefisien regresi variable inflasi sebesar -0.000821 artinya bahwa apabila tingkat inflasi naik sebesar 1%, maka jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami penurunan sebesar 0,082 % dengan asumsi variable lainnya konstan.

C. Uji T (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independent (X) secara individual terhadap variabel Dependen (Y). Pengambilan kesimpulannya:

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya H_a diterima (Variabel X secara individu berpengaruh terhadap variabel Y).
- Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ maka H_a ditolak artinya H_0 diterima (Variabel X secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel Y).

Sehingga:

- 1) Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar $9,6817 > t_{tabel}$ ($0,05;17$) sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Variabel pengangguran memiliki nilai thitung sebesar $1,098 < t_{tabel}(0.05;17)$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0,2874 > 0.05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Variabel inflasi memiliki nilai thitung sebesar $0,2897 < t_{tabel}(0.05;17)$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0,7755 > 0.05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

D. Uji F (Silmultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independent (X) secara Bersama-sama terhadap variabel Dependen (Y). Pengambilan kesimpulannya:

- Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya H_a diterima (Variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y).
- Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau $sig > 0,05$ maka H_a ditolak artinya H_0 diterima (Variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y)

Sehingga Nilai Fhitung sebesar $48,9674 > t_{tabel}(0.05;3;17)$ sebesar 3,20 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0.05$, maka H_0 ditolak artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

E. Uji Koefisien Determinasi R^2

Berdasarkan tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa nilai R-Square sebesar 0,8962. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi memberikan kontribusi sebesar 89,62% terhadap penyerapan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, sisanya 10,38% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dalam penelitian ini.

F. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Hasil ini sejalan dengan teori Keynes (1936) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.

Secara empiris, hasil ini juga konsisten dengan penelitian oleh Simanjuntak (2021) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Pada konteks Sumatera Utara, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan bergantung pada ketepatan alokasi dan efisiensi penggunaan anggaran. Jika pengeluaran tidak tepat sasaran, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan menjadi tidak optimal (Hidayat & Siregar, 2020).

G. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran meningkat, tidak secara langsung menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor penyanga seperti bantuan sosial dan kegiatan ekonomi informal yang masih mampu menyerap tenaga kerja.

Penelitian oleh Nasution (2020) menyatakan bahwa pengangguran memang dapat mempengaruhi kemiskinan, namun dampaknya tidak selalu signifikan terutama jika ada intervensi kebijakan sosial yang memadai. Selain itu, pengangguran yang tidak berdampak signifikan pada kemiskinan juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan karakteristik ekonomi daerah yang lebih mengandalkan sektor informal.

H. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil analisis, inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat inflasi tidak secara langsung meningkatkan atau menurunkan jumlah penduduk miskin. Dalam kondisi tertentu, inflasi yang moderat dapat diimbangi oleh kenaikan pendapatan atau adanya kebijakan stabilisasi harga dari pemerintah.

Ketidaksignifikanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan harga serta adanya kebijakan subsidi dari pemerintah yang membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, laju inflasi yang moderat cenderung tidak terlalu

membebani rumah tangga miskin, sehingga dampaknya terhadap tingkat kemiskinan menjadi tidak terlihat secara langsung.

Hasil ini selaras dengan penelitian oleh Hidayat & Siregar (2021) yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, inflasi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, terutama jika pemerintah berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memberikan subsidi yang tepat sasaran.

I. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa interaksi ketiga variabel tersebut secara keseluruhan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah ini.

Signifikansi pengaruh secara simultan mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa hanya berfokus pada satu variabel saja. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pengeluaran produktif, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan yang terintegrasi dan sinergis akan lebih efektif dalam menangani permasalahan kemiskinan.

Signifikansi secara simultan dapat terjadi karena dalam model regresi berganda, variabel inflasi mungkin berperan sebagai variabel moderator atau variabel penguat terhadap variabel lain seperti pengeluaran pemerintah atau pengangguran. Dalam konteks ini, inflasi mungkin tidak memengaruhi kemiskinan secara langsung, tetapi berinteraksi dengan variabel lain sehingga memberikan efek gabungan yang signifikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan temuan empiris sebelumnya yang menunjukkan bahwa kombinasi pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi berperan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat (Siregar, 2024; Simanjuntak, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan alokasi anggaran pemerintah, terutama pada program-program yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, dapat berkontribusi secara efektif dalam mengurangi kemiskinan. Namun, variabel pengangguran dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun demikian, secara simultan, ketiga variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi tetap diperlukan.

Untuk mengoptimalkan dampak pengeluaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan efektivitas alokasi anggaran dengan memastikan program-program tepat sasaran dan diawasi ketat untuk mencegah kebocoran. Meskipun pengangguran dan inflasi tidak signifikan, sektor informal harus diperkuat melalui program padat karya dan pemberdayaan UMKM, sementara stabilitas harga bahan pokok dijaga dengan intervensi pasar dan bantuan sosial. Secara keseluruhan, kebijakan yang komprehensif dengan sinergi antara pengeluaran pemerintah, ketenagakerjaan, dan pengendalian inflasi diperlukan agar pengurangan kemiskinan lebih efektif dan berkelanjutan, dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Laporan kemiskinan Indonesia tahun 2021. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Laporan inflasi dan kemiskinan di Indonesia tahun 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Laporan kemiskinan dan ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Laporan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2022. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan inflasi regional Sumatera Utara. Jakarta: Bank Indonesia.
- Blanchard, O. (2020). Macroeconomics (7th ed.). Boston: Pearson.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, I. (2002). Pokok-pokok materi statistik 1 (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

- Hidayat, T., & Siregar, R. (2020). Efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123-140.
- Hidayat, T., & Siregar, R. (2021). Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 45-58.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Dampak belanja pemerintah terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. London: Palgrave Macmillan.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Nasution, A. (2020). Analisis dampak inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 15(1), 78-92.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics* (20th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Simanjuntak, B. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45-60.
- Simanjuntak, B. (2023). Analisis dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan subsidi terhadap kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 15-30.
- Siregar, L. (2021). Hubungan pengangguran dan kemiskinan: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro dan Mikro*, 14(3), 101-115.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- World Bank. (2020). *Economic impact of COVID-19 in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.